

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tata kelola dan dukungan politik terhadap praktik korupsi pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Variabel yang digunakan mencakup capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan nilai temuan audit otonomi khusus untuk mencerminkan tata kelola pemerintahan daerah. Sementara itu, aspek dukungan politik kepada kepala daerah dianalisis melalui variabel dukungan politik legislatif dan dukungan politik partai lokal.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai temuan audit otonomi khusus mencapai nilai tertinggi sebesar Rp3.61 miliar, menandakan tingkat risiko korupsi yang signifikan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Lebih lanjut, estimasi statistik menguatkan hubungan positif antara nilai temuan audit dan jumlah pelaku korupsi. Oleh karena itu, solusi atas masalah korupsi pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh terletak pada peningkatan tata kelola, yang mencakup peningkatan MCP dan AKIP.

Analisis data menunjukkan bahwa peningkatan capaian MCP dan AKIP berkorelasi dengan penurunan kasus korupsi, didukung oleh temuan statistik yang menunjukkan dampak negatif terhadap jumlah pelaku korupsi. Penelitian ini menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh harus difokuskan pada perbaikan tata kelola. Temuan audit dapat dijadikan indikator risiko korupsi, dengan upaya pencegahan melibatkan peningkatan nilai capaian MCP dan AKIP pemerintah daerah minimal pada kategori B.

Pada aspek dukungan politik, hasil menunjukkan bahwa dukungan politik legislatif memiliki dampak positif, sementara dukungan politik partai lokal menunjukkan dampak negatif terhadap jumlah pelaku korupsi. Koefisien positif dukungan politik legislatif mengindikasikan bahwa dalam kondisi *unified government*, tingkat korupsi cenderung meningkat. Sebaliknya, kondisi *divided government*, pada kondisi kepala daerah tidak didukung oleh mayoritas partai di

legislatif, muncul sebagai kondisi ideal yang dapat mencegah korupsi melalui mekanisme *check and balances* yang lebih kuat antara eksekutif dan legislatif.

Sedangkan untuk dukungan partai lokal yang memiliki arah koefisien negatif tidak sejalan dengan hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa korupsi lebih banyak terjadi pada kelompok pemerintah daerah yang didukung oleh partai lokal. Namun secara statistik, penelitian ini menemukan hasil berbeda yang menunjukkan bahwa kehadiran partai lokal mampu menekan korupsi pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Kondisi ini mencerminkan bahwa partai lokal sebagai representasi masyarakat Aceh telah mampu menghadirkan proses *check and balances* pada pelaksanaan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Provinsi Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memberikan landasan bagi upaya perbaikan tata kelola dan pengoptimalan dukungan politik sebagai strategi pencegahan korupsi yang efektif di pemerintah daerah Provinsi Aceh. Oleh karena itu, implikasi kebijakan diarahkan pada langkah konkret untuk memperkuat mekanisme tata kelola dan memastikan dukungan politik yang mendukung integritas dan akuntabilitas pemerintahan daerah, yaitu mendorong peningkatan capaian MCP dan AKIP, memperkuat efektivitas pengawasan internal, mengoptimalkan dukungan politik partai lokal dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat mekanisme *check and balances* secara responsif dan berintegritas.

B. Rekomendasi

Upaya untuk mengurangi Tingkat korupsi pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, langkah-langkah strategis perlu diimplementasikan. Pertama, pemerintah daerah harus meningkatkan capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Ini dapat dilakukan dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan internal. Kedua, penting untuk memperkuat efektivitas pengawasan internal, terutama terkait dengan pengelolaan dana publik, termasuk dana otonomi khusus. Penguatan ini akan membantu mendeteksi dan mencegah risiko penyalahgunaan dana publik.

Selanjutnya, optimalisasi dukungan politik dari partai lokal dalam pengelolaan keuangan daerah juga perlu diperhatikan. Dialog dan konsultasi rutin dengan perwakilan partai lokal serta komitmen bersama terhadap praktik politik yang bersih dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari korupsi. Terakhir, diperlukan penguatan mekanisme *check and balances* antara eksekutif dan legislatif. Ini memerlukan independensi legislatif dalam menjalankan peran pengawasan dan kesepahaman antara kedua lembaga pemerintahan dalam prioritas pelayanan masyarakat.

Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan campuran dan studi perbandingan dengan daerah lain sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik korupsi pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh.

